



Subsidiaritas Sebagai Prinsip Sosial dalam Upaya Menyelamatkan Masyarakat Lokal Dari Ancaman Sawit

Yulianus Korain

Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Benediktus Sorong, Indonesia

Email: yulianuskorain@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada subsidiaritas sebagai prinsip sosial dalam upaya menyelamatkan masyarakat lokal dari ancaman sawit, sebuah studi teologis fenomenologis, yang lebih menggali nilai-nilai yang termuat dalam Dokumen Gereja Katolik sebagai fondasi dalam menelaah situasi sosial yang dialami masyarakat lokal sebagai pemilik tanah adat. Sesungguhnya penelitian ini lebih diarahkan pada kehidupan sosial masyarakat lokal sebagai pemilik tanah adat, yang tanahnya dijadikan perkebunan sawit. Perkara keberpihakan ini yang disebut oleh Gereja sebagai subsidiaritas. Subsidiaritas sesungguhnya berarti suatu sikap yang sudah dimulai oleh Yesus ketika memperjuangkan martabat kaum terpinggirkan, tertindas, miskin dan sederhana. Perjuangan Gereja bagi masyarakat lokal merupakan wujud nyata dari sikap Yesus. Selanjutnya penulis menganalisis subsidiaritas masyarakat lokal dengan menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara), studi data dan dokumen Gereja. Dari hasil analisis tersebut ditemukan bahwa subsidiaritas sesungguhnya berasal dari Yesus Sang proklamator, pejuang dan pembebas yang ulung. Subsidiaritas tersebut yang sedang dihayati, dibatinkan oleh Gereja ketika memperjuangkan hak masyarakat lokal. Semua persoalan-persoalan yang dialami masyarakat lokal, pemerintah dan Gereja menjadi mudah dan menyegarkan apabila dikembalikan pada sumber utama Yesus Kristus tokoh pembebas. Unsur-unsur yang memuat mengenai subsidiaritas dimuat dalam Ensiklik Paus Fransiskus tentang Ajaran Sosial Gereja di Masa Pandemi dan dan Ensiklik Quadragesimo Anno (Encyclical Of Pope Pius XI). Dokumen tersebut amat kaya akan nilai-nilai spiritualitas yang menjadi pedoman hidup para pemimpin pemerintah maupun Gereja. Akhirnya penelitian ini akan dikontekstualisasikan dalam persoalan-persoalan hidup dan pelayanan para pemimpin Gereja dan pemerintah keuskupan Manokwari-Sorong.

Kata Kunci: Subsidiaritas, Martabat Manusia, Memulihkan Kehidupan.

Abstract

This research focuses on subsidiarity as a social principle in an effort to save local communities from the threat of oil palm, a phenomenological theological study, which explores the values contained in Catholic Church Documents as a foundation in examining the social situation experienced by local communities as customary landowners. In fact, this research is more directed at the social life of local communities as customary landowners, whose land is turned into oil palm plantations. This is what the Church calls subsidiarity. Subsidiarity actually means an attitude that Jesus started when fighting for the dignity of the marginalised, oppressed, poor and simple. The Church's struggle for local communities is a concrete manifestation of Jesus' attitude. Furthermore, the author analyses the subsidiarity of local communities by using qualitative methods (observations, interviews), data studies and Church documents. From the analysis, it was found that subsidiarity actually comes from Jesus, the proclaimer, fighter and liberator. This subsidiarity is what is being lived, internalised by the Church when fighting for the rights of local communities. All problems experienced by local communities, the government and the Church become easy and refreshing when returned to the main source of Jesus Christ, the liberator. Elements of subsidiarity are contained in Pope Francis' Encyclical on the Social Teaching of the Church during the Pandemic and the Encyclical Quadragesimo Anno (Encyclical of Pope Pius XI). These documents are very rich in spiritual values that guide the lives of government and Church leaders. Finally, this research will be contextualised in the problems of life and service of Church and government leaders in the diocese of Manokwari-Sorong.

Keywords: Subsidiarity, Human Dignity, Restoring Life.

PENDAHULUAN

Panggilan untuk melayani kaum miskin merupakan panggilan yang telah dimulai oleh Allah. Allah dalam diri-Nya menghendaki semua manusia diselamatkan (Pattiasina, 2021). panggilan tersebut sudah dimulai sejak perjanjian lama, misalkan panggilan nabi Yunus. Dalam kitab nabi Yunus dikatakan: bangunlah pergi ke Niniwe, kota yang besar itu berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepada-Ku (Yun 1:2). Panggilan yang diterima nabi Yunus bukan semata-mata panggilan yang bersifat biasa melainkan panggilan yang mengarah pada perjanjian keselamatan. Nabi Yunus disertai misi keselamatan untuk menyelamatkan umat Allah di kota Niniwe. Awalnya nabi Yunus mengingkari panggilan tersebut namun Allah pada panggilan kedua-Nya kepada nabi Yunus (Yun 3:1-2), ia pun segera menuruti panggilan Allah tersebut. Nabi Yunus dalam menjalankan misi panggilan tersebut dengan melintasi berbagai kesulitan geografis, budaya dan bahasa (Simon, 2020:73). Panggilan dalam konteks Perjanjian Lama, merupakan panggilan untuk bersiarah menuju kebaikan bersama Allah. Panggilan tersebut tidak hanya terbatas pada Perjanjian Lama namun panggilan tersebut masih berlangsung pada zaman Yesus. Yesus diutus untuk memberitakan Kerajaan Allah, membebaskan orang tawanan, membangkitkan orang mati dan seterusnya. Kehadiran Yesus dinilai sebagai ancaman bagi para penguasa dan pemimpin Yahudi, namun bagi rakyat kecil kehadiran Yesus sebagai tokoh pembebas. Yesus memanggil para murid dengan memberi kuasa kepada mereka “pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman (Mat 28:19-20). Dalam *Gaudium et Spes* diuraikan bahwa “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga (GS 1). Rumusan dokumen tersebut mengidentifikasi keberpihakan Gereja terhadap orang miskin selaras ajaran Yesus (Luk 4:18). Karya keselamatan Allah mesti dialami dan dirasakan oleh semua manusia terutama kaum miskin (Elisa, 2019:3). Orang miskin selalu dipandang sebelah mata, hanya dinilai dari pekerjaan, pendidikan kedudukan dan status sosial sehingga keberadaannya tidak diperhitungkan. Orang miskin seringkali dikorbankan dengan sistem yang kurang manusiawi. Orang miskin tidak memiliki hak untuk melawan karena tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan tidak berpihak padanya sehingga mereka selalu sabar terhadap apapun yang menimpanya (Aditya dan Eggi, 2020). Pergulatan hidup orang miskin yang perjuangan oleh Yesus ini yang disebut subsidiaritas. Istilah subsidiaritas sendiri berasal dari bahasa Latin: *subsidium*: membantu, menolong, yang mengarah pada praktik militer Romawi dalam mengerahkan pasukan cadangan untuk memperkuat garis pertempuran pada saat kebutuhan mendesak (Evans Zimmerman, 2014:73). Selanjutnya Joseph Drew menguraikan bahwa penguasa tertinggi dalam konteks negara memiliki kewajiban untuk menawarkan bantuan kepada masyarakat yang lebih rendah (Joseph Drew, 2020:5).

Yesus dalam kesehariannya menekuni apa yang disebut subsidiaritas kepada rakyat kecil, mereka yang menderita dan kurang beruntung. Perjuangan Yesus tersebut demi mewujudkan apa yang disebut kebaikan bersama. Kebaikan itu sendiri bukan milik orang pandai dan para penguasa, melainkan kebaikan itu mesti dialami oleh semua manusia. Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambar-Nya, untuk maksud itulah kebaikan mesti disentuh semua orang. Menurut Russell Hittinger, makna kebaikan bersama justru terfokus pada unsur intrinsik yang menginginkan kesatuan masyarakat yang hakiki dan bermartabat (Hittinger, 2018).

Dengan sendirinya, kebaikan bersama tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat didistribusikan, diungkapkan, melainkan dapat dihayati oleh masyarakat (Popovic, 2019). S.A. Long mengatakan bahwa kebaikan bersama sangat instrumental dan tidak memiliki referensi yang jelas dan langsung merujuk pada persekutuan, solidaritas dalam kebaikan (Long, 2017). Sebagai bagian dari ajaran sosial Gereja, prinsip subsidiaritas mengajarkan kita bahwa masalah sosial harus diselesaikan pada tingkat yang paling dekat dengan individu, dan solidaritas merupakan dasar untuk mencapai kebaikan bersama yang inklusif dan adil (Pope John Paul II, 1991; Pope Benedict XVI, 2009; Pope Francis, 2015).

Bertolak dari panggilan dan keputusan Yesus dalam keberpihakkannya kepada orang kecil, dapat disنادakan dengan pandangan Gereja terhadap kehidupan masyarakat lokal yang berdampak perkebunan sawit. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas utama dalam perekonomian Indonesia sebagai penghasil devisa negara (Ambiyah, 2012). Menurut data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada bulan Februari 2018, luas areal kelapa sawit di Indonesia saat ini mencapai 14,3 juta hektar. Luas areal perkebunan kelapa sawit tersebut terbagi atas 51,86% Perkebunan Besar Swasta, 41,42% Perkebunan Rakyat, dan 6,72% Perkebunan Besar Negara. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang memiliki andil besar dalam menghasilkan pendapatan asli daerah, produk domestik bruto, dan kesejahteraan masyarakat (Afifuddin, 2007).

Dalam aspek ekonomi, industri kelapa sawit berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan, menghasilkan devisa negara, membangun daerah, dan berhasil menciptakan petani berpenghasilan menengah. Ekspansi kelapa sawit menimbulkan berbagai masalah bagi masyarakat lokal. Ekspansi perkebunan kelapa sawit dapat menimbulkan masalah lingkungan (Yusop et al., 2018; Sharma et al., 2019). Ekspansi perkebunan kelapa sawit juga dapat menyebabkan deforestasi, peningkatan emisi karbon, dan perubahan iklim yang dapat mengganggu kondisi lingkungan. Alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit menutup akses masyarakat lokal, sehingga kemiskinan masyarakat lokal di sekitar perkebunan kelapa sawit menjadi sebuah keniscayaan (Yulian dkk., 2017; Andrianto dkk., 2019).

Sepanjang Januari-April 2022, ditemukan dua perusahaan perkebunan kelapa sawit melakukan penggusuran hutan untuk perluasan kebun kelapa sawit, yakni PT Inti Kebun Sejahtera (IKSJ) di Dusun Klawiri, Distrik Moi Segun, dan PT Inti Kebun Sawit (IKS), di Kampung Klawor Distrik Seget, Kabupaten Sorong. Berdasarkan informasi citra satelit dan keterangan warga, diperkirakan hutan yang hilang digusur dua perusahaan tersebut, yakni PT IKSJ seluas 60 hektar dan PT IKS seluas 240, seluruhnya seluas 300 hektar. Diperkirakan luas deforestasi akan bertambah. Peneliti melakukan observasi bersama beberapa masyarakat lokal yang mendiami wilayah kampung Klawor Distrik Seget, Kabupaten Sorong, yang tanah adatnya dirampas dijadikan perkebunan sawit, peneliti melakukan telaah dokumen terhadap temuan-temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit terhadap masyarakat lokal.

Usaha kebun sawit tersebut dinilai menghancurkan, mengancam kehidupan manusia dan juga satwa liar yang mendiami hutan tersebut. Binatang, air, pohon sagu dan hutan menjadi punah karena ada penebangan liar. Kehadiran sawit juga dinilai sebagai pemicu konflik sosial antar masyarakat adat. Pengelolaan perkebunan sawit yang jauh dari upaya mensejahterakan masyarakat justru melahirkan konflik terbuka untuk perebutan lahan, antar pemilih tanah adat. Ekspansi perkebunan kelapa sawit berdampak pada tingginya frekuensi konflik sosial

khususnya konflik antar pemilik tanah adat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit “pemilik modal” (Amalia, R. dkk 2019). Tindakan yang diambil pemerintah mengakibatkan banyak pihak yang merasa terancam terutama pemilik modal dan pengusaha.

Dengan adanya ancaman tersebut, pemilik modal mengajukan kasus tersebut pada pengadilan negeri di Jayapura dengan tujuan agar persoalan tersebut diurus tuntas. Dalam kalangan masyarakat adat, ada juga yang mendukung sikap pemerintah dan adapun yang menolak. Mereka yang mendukung dinilai sebagai pribadi yang mampu melihat makhluk ciptaan lain sebagai saudara (kata Santo Fransiskus), memaknai tanah sebagai ibu yang memberi kehidupan. Namun mereka yang menerima adanya perusahaan ini karena sudah disuap dengan rupiah, dalam pemahaman tertentu mereka tidak menghargai tanah sebagai ibu yang melahirkan mereka. Sikap yang diambil pemerintah ini mendapat dukungan penuh dari Gereja keuskupan Manokwari-Sorong, sebagaimana dikatakan oleh yang mulia Mgr. Hilarion Datus Lega “Keprihatinan pemerintah adalah keprihatinan Gereja”. Akhirnya dalam penilitan ini akan difokuskan pada subsidiaritas sebagai fondasi untuk mengali nilai-nilai kristiani. Nilai-nilai kristiani yang digali dapat membantu manusia untuk merenungkan tentang martabatnya sebagai citra Allah dan menjaga relasi sosial antar sesama demi kebaikan bersama.

Penelitian oleh Yulian et al. (2017) membahas dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit terhadap masyarakat lokal, mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan menyebabkan kemiskinan dan merusak hubungan sosial antar komunitas. Namun, penelitian ini tidak mengeksplorasi bagaimana pemahaman agama, khususnya nilai-nilai Kristiani, dapat mempengaruhi respons masyarakat terhadap konflik sosial yang muncul akibat ekspansi industri sawit. Di sisi lain, penelitian oleh Amalia et al. (2019) menyoroti tingginya frekuensi konflik sosial akibat persaingan antara pemilik tanah adat dan perusahaan perkebunan, namun kurang menekankan pada peran gereja atau nilai-nilai moral dalam meredakan atau memperburuk konflik tersebut. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan mengeksplorasi peran subsidiaritas dan nilai-nilai Kristiani dalam membangun dialog antara pemangku kepentingan, serta bagaimana gereja dapat memediasi konflik yang muncul antara masyarakat adat dan perusahaan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai Kristiani dapat mengarahkan masyarakat untuk merenungkan martabat manusia dan relasi sosial dalam konteks industri kelapa sawit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran subsidiaritas dalam nilai-nilai Kristiani yang dapat membantu masyarakat adat memahami pentingnya relasi antar sesama dan menjaga martabat manusia di tengah konflik akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman bagaimana nilai-nilai agama, terutama ajaran Kristiani, dapat berperan dalam meredakan konflik sosial yang muncul dari ketimpangan ekonomi yang ditimbulkan oleh industri kelapa sawit. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi gereja untuk lebih aktif dalam mendukung solusi berbasis kebaikan bersama dan memperkuat peran subsidiaritas dalam mendukung keberlanjutan hidup masyarakat lokal dan menjaga lingkungan hidup.

METODE PENELITIAN

Untuk Menyusun penelitian ini, penenliti mendasarkan diri pada metode kualitatif, (pengamatan, wawancara) studi data dan dokumen, selain itu peneliti juga menggunakan metode analisis kristis atas persoalan sosial yang dialami masyarakat lokal terutama

masyarakat Moi di kampung Klawor Papua Barat Daya. Peneliti melakukan pendekatan bersama masyarakat pemilik tanah adat yang tanah adatnya telah dikonversi menjadi lahan perkebunan sawit, selain itu peneliti juga menjumpai beberapa masyarakat yang bukan pemilik tanah yang berdiam di area perkebunan sawit. Fenomena yang dijumpai di area perkebunan sawit antara lain persediaan air semakin berkurang, lahan menjadi kurang produktif, kesehatan masyarakat menjadi kurang stabil. Kebanyak masyarakat menghabiskan waktu di kota. Peneliti melakukan telaah dokumen Gereja dan disenadakan temuan-temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dampak ekspansi perkebunan kelapa sawit terhadap masyarakat lokal, terutama penelitian yang dilakukan oleh Fransina F Kesaulija dkk (2014), dengan judul: *Oil palm estate development and its impact on forests and local communities in West Papua*, penelitian ini terjadi di wilayah Arfak Manokwari Papua Barat. Dari hasil penelitian tersebut dijumpai beberapa persoalan misalnya hak tanah adat dikonversi, kesehatan kurang stabil, terjadi konflik sosial antara masyarakat pemilik tanah tanah (Fransina F Kesaulija dkk, 2014). Akhirnya dari hasil observase tersebut peneliti mengajukan beberapa temuan misalnya adanya reboisasi dan konservasi terhadap hutan adat dan perlu ada perlindungan hukum dari pemerintah maupun adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subsidiartias

Setiap kita dipanggil untuk bertanggungjawab atas kehidupan yang sedang dijalani. Apapun yang terjadi merupakan pengalaman yang membentuk setiap pribadi makin dimurnikan. Persoalan sosial, politik dan ekonomi yang dialami masyarakat lokal bukan semata-mata perkara satu dua orang melainkan perkara semua manusia. Manusia dalam kesehariannya menyadari dan membatinkan betapa kehadirannya amat mulia bagi sesama. Persoalan sosial yang dialami tidak hanya ditangani secara personal, melainkan ditanggapi secara komunal berdasarkan peran, kedudukan masing-masing dalam hidup bersama. Seringkali dijumpai ada diantara kita yang sulit bergabung dalam komunitas karena tidak diakui, dihargai dan diterima, bahkan dalam kelompok sosial tertentu kurang terlibat karena secara sosial ekonomi dinilai terpuruk. Di beberapa kawasan ditemukan masyarakat lokal kurang diberi ruang untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran, sebab bila bersuara akan ditempatkan pada kriminal yang berujung pada hukuman yang tidak sewajarnya. Rupanya tindakan semacamnya dapat memenjarakan ruang gerak masyarakat lokal.

Kitab Suci sejak awal telah mengingatkan kita akan hal tersebut. Renungkan kisah menara Babel (Kej 11), yang menggambarkan motivasi kala itu hendak menggapai surga dengan menyangkal relasi dengan manusia, ciptaan dan Pencipta. Setiap orang memiliki motivasi ingin menjadi lebih tinggi tanpa menaruh pertimbangan akan sesama. Kontekstualisasi dari narasi menara Babel menggambarkan keinginan setiap orang untuk membongkar hutan, menggusur lahan, menebang pohon hanya untuk merusak komunitas. Kita ingin menjadi penguasa atas bumi, namun menghancurkan keragaman hayati dan keseimbangan ekologis. Jika Hutan dihabiskan maka tanah akan kehilangan tanaman pelindungnya dan membuat tanah menjadi tidak stabil sehingga mudah mengalami erosi.

Di musim hujan akan terjadi banjir dan longsor sementara di musim kemarau terjadi kekeringan akibat keringnya sumber-sumber air di dalam hutan. Akibat dari keberadaan perkebunan sawit yang tidak sesuai dengan standar ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil

Certification System) maka dipastikan masyarakat di wilayah hutan yang nantinya merasakan dampak nyata dari keberadaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Dalam catatan akhir tahun 2022 yang diluncurkan Rabu, 15 Februari 2023 di Jakarta, Pusaka mengatakan total luas kawasan hutan yang rusak akibat pembalakan kayu seluas 16.656 hektare. Menurut Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, deforestasi akibat aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit di Papua cenderung meningkat. Sebelumnya, pada 2021, kawasan hutan yang hilang seluas 1.552 hektare. Luas ini meningkat menjadi 2.639 hektare pada 2022. Selain itu Masyarakat adat Moi di Kampung Masmili, Distrik Moisejin, Kabupaten Sorong, mengeluh atas aktivitas penggusuran hutan adat oleh PT IKSJ yang berada di luar kesepakatan. Marga Mugu mengadukan PT IKS yang tidak transparan dan menggusur hutan adat tanpa persetujuan luas dari anggota marga, namun pemerintah belum menanggapi keluhan warga terhadap perusahaan yang diduga melakukan kejahatan lingkungan. Tindakan semacamnya dinilai merusak bumi bahkan tidak bersolider dengan bumi, yang adalah anugerah dan keseimbangan ekologis. Dengan adanya sikap yang kurang representatif terhadap tanah adat masyarakat lokal, bupati kabupaten Sorong mengambil langkah mencabut izin perkebunan sawit, rupanya tindakannya menimbulkan perkara bagi pemilik modal (baca: Papua Barat Cabut Ijin Sawit Sabtu 25 April 2021).

Perlu disadari bahwa manusia Papua dalam kesehariannya memaknai tanah sebagai ibu yang perlu dilindungi dan dirawat. Kesadaran akan tanah sebagai ibu bukan hanya terbatas pada orang Papua melainkan secara luas bagi siapapun yang berdiam di negeri ini. Guna memulihkan tanah sebagai ibu mesti dibangun sumber daya manusia agar memiliki kesadaran bersama untuk memelihara, melindungi dan merawat. Walaupun dalam hidup bersama ada kecenderungan untuk menyingkirkan mereka yang lemah dan tak bersuara. Semestinya kita bersikap seperti sebutan bahasa Spanyol *cuidadores* (pengasuh), bagi masyarakat lokal, terutama mereka yang kurang mendapat peran dan kadang diabaikan. Melindungi adalah hukum kodrat sebagai manusia (LS 70). Kasadaran akan cinta dan kepedulian terhadap sesama mesti diperluas juga pada penghayatan akan alam sebagai rumah bersama, sebab semua bentuk kehidupan saling terkait satu sama lain (LS 137-138). Selanjutnya perkara kesehatan ekosistem tergantung pada manusia yang telah diberi kepercayaan untuk merawat dan memelihara (Kej 2:15). Menodai dilain pihak merupakan dosa berat yang merusak tatanan ekosistem dan besar kemungkinan melukai manusia dan membuat manusia sakit (LS 8, 66). Apabila setiap manusia tidak belajar untuk mencintai dan mengagumi ekosistem sebagai karya Allah yang indah, maka tidak boleh terkejut kalau manusia menyalahgunakan objek untuk kepentingan tertentu tanpa merasa bersalah (LS 215). Kecintaan dalam merawat yang lemah dan ekosistem merupakan suatu kekayaan manusiawi. Kesadaran untuk membangun dan memperdayakan masyarakat lokal itulah yang disebut subsidiaritas.

Robert A. Sirico dalam *Subsidiarity, Society, And Entitlements: Understanding And Application*, dengan mengutip “*Centesimus Annus, the Catechism of the Catholic Church* states it as follows: “A community of a higher order should not interfere in the internal life of a community of a lower order, depriving the latter of its functions, but rather should support it in case of need and help to coordinate its activity with the activities of the rest of society, always with the view to the common good”. “Katekismus Gereja Katolik menguraikan: “Sebuah komunitas dengan tingkatan yang lebih tinggi tidak boleh mencampuri kehidupan internal komunitas yang lebih rendah, merampas fungsi-fungsinya, melainkan harus mendukungnya

jika diperlukan dan membantu mengkoordinasikan aktivitasnya dengan aktivitas masyarakat lainnya dengan tujuan untuk kebaikan bersama” (Robert A Sirico, 2014). Kata subsidiaritas berasal dari bahasa Latin subsidium, yang berarti membantu atau menolong. Dari akar kata ini dengan sendirinya dipahami satu sifat permanen dari satu tatanan (pemerintah). Dalam *Rerum Novarum* Paus Leo XIII mengatakan “manusia lebih tua dari pada negara. Dengan sendirinya negara berkewajiban melayani masyarakat yang kesulitan, gangguan serius bahkan hak-hak mereka diabaikan. Otfried HÖFFE dalam *Subsidiarität als Gesellschafts- und Staatsprinzip* menguti apa yang dikatakan Jellinek (1914) bahwa negara hanya boleh campur tangan "sejauh tindakan individu “masyarakat” tidak mampu mencapai tujuan yang dimaksudkan" (Otfried HÖFFE, 1997)

Merujuk pada depresi ekonomi tahun 1929, Paus Pius XI dalam ensiklik *Quadragesimo Anno* (selanjutnya QA) menjelaskan betapa pentingnya prinsip subsidiaritas dengan menegaskan bahwa kegiatan apapun yang dapat dilaksanakan dengan baik oleh kelompok-kelompok kecil biarlah tetap dilaksanakan oleh kelompok-kelompok itu dan bukan dipusatkan pada negara dalam konteks ini para investor dan penguasa (QA 79-80).

Prinsip fundamental yang perlu dihayati antara lain setiap manusia ingin sejahtera. Kesejahteraan itu dapat didukung oleh golongan yang lebih tinggi (pemerintah dan Gereja), membantu golongan yang lebih rendah (masyarakat lokal) apabila ditemukan masyarakat lokal, kelompok etnis, kelompok kategorial dan semacamnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, misalnya hak-hak mereka diabaikan, suara mereka tidak didengar, tanah adat mereka dirampas dan semacamnya pemerintah dan Gereja mesti bersuara demi kemanusiaan. Perkara kemanusiaan bukan terbatas pada pemerintah dan Gereja melainkan, siapa pun diberi ruang untuk bersuara, bolehlah bersuara.

Setiap orang perlu diberi ruang untuk mengungkapkan aspirasinya sebagai wujud tanggungjawabnya bagi pemulihan masyarakat, di mana mereka sendiri menjadi bagiannya. Misalnya sebuah proyek dikucurkan secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan kelompok sosial tertentu, maka kelompok-kelompok masyarakat lokal tidak boleh diabaikan. Proses tersebut menjadi menyenangkan bila membiarkan masyarakat lokal mengungkapkan apa yang dirasakan dan digumuli, bukan diintervensi oleh pihak-pihak tertentu, itulah prinsip subsidiaritas bekerja. Singkat kata, kita tidak boleh mengabaikan keterlibatan masyarakat lokal, perkara kebijakan, kesetiaan, dan perhatiannya dalam suatu tanggungjawab tertentu (QA 32; LS 63).

Sayangnya ketidakadilan masih sering terjadi di tempat-tempat di mana kepentingan ekonomi dan geopolitik besar terpusatkan misalnya aktivitas-aktivitas ekstraktif tertentu di beberapa kawasan negeri ini (QA 9.14). Suara-suara dari masyarakat lokal, “masyarakat pribumi” budaya dan pandangan hidup mereka jarang dijadikan bahan pertimbangan. Dewasa ini, hilangnya penghargaan akan prinsip subsidiaritas seperti ini telah menyebar bagai virus. Dalam konteks tertentu ditemukan para pemilik modal lebih mendengarkan dan menghargai mereka yang kuat dari pada yang lemah, dan ini bukanlah cara yang manusiawi, cara yang Yesus ajarkan atau bukan pula prinsip subsidiaritas.

Ada semacam ungkapan klasik “segalanya bagi rakyat, tapi tidak ada yang dengan rakyat”. Rumusan tersebut membantu menyadarkan para politis dan penguasa yang kurang peka menghidupi kebijaksanaan masyarakat lokal dengan membantu mengantar mereka keluar dari krisis yang dialami. Setiap orang harus didengarkan, diterima, diakui dan dihargai

keberadaannya. Untuk keluar dari krisis, prinsip subsidiaritas harus diberlakukan, dengan menghargai otonomi dan kapasitas setiap orang istimewa masyarakat lokal. Sebagaimana dikatakan rasul Paulus semua bagian dari tubuh dibutuhkan (1Kor 12:12-27), kita telah mendengar bahwa bagian-bagian yang tampak paling lemah dan kurang penting, dalam kenyataannya adalah yang paling dibutuhkan (1Kor 12:22).

Dengan sendirinya dapat dipahami bahwa prinsip subsidiaritas memungkinkan setiap orang mengambil peran bagi pemulihan dan kebaikan bersama. Dengan penerapan prinsip subsidiaritas memberikan harapan bahkan mendatangkan harapan akan masa depan yang lebih sehat dan lebih adil; mengundang kita untuk merancang masa depan ini secara bersama, menginginkan akan hal-hal besar, memperluas cakrawala dan gambaran ideal kita. Amat diharapkan kerja sama untuk keluar dari krisis yang dialami masyarakat lokal. Untuk keluar dari krisis tidak berarti memoles situasi saat ini, sehingga tampak terkesan adil, melainkan membangun kesadaran untuk berubah. Perubahan tersebut menuntut keterlibatan semua orang, apapun profesinya. Sebagaimana Yesus katakan “Aku akan menjadikan segalanya baru” (Why 21:5).

Marilah kita membangun masa depan, di mana dimensi lokal dan global saling memperkaya satu sama lain, setiap orang dapat terlibat, semua orang musti menyumbangkan andilnya, dari budaya, filsafat dan cara berpikir, singkatnya yang mempunyai lebih mesti terbuka membaktikan diri bagi yang berkekurangan “terbatas”.

Martabat Manusia

Konsep mengenai martabat manusia diperkenalkan sejak zaman Romawi Kuno dengan sebutan dignitas. Dignitas dalam pemahamannya mengarah pada bentuk penghargaan yang disertai kepada seseorang perkara peran sosialnya dalam masyarakat (Matthias, 2020). Matthias (2020) menguraikan bahwa martabat dignity juga mengacu pada kapabilitas fungsional, tindakan yang berlandas keutamaan-keutamaan virtuous behavior yang mengarah pada derajat tertentu yang dimiliki seseorang dalam hidup bermasyarakat. Gene Editing, the Mystic Threat to Human Dignity, mengutip Filsafat Kant dengan menekankan aspek martabat manusia bahwa dilarang memanfaatkan manusia sebagai sarana dan tujuan melainkan memanfaatkan manusia seperti diri sendiri dan juga orang lain, pada saat yang sama tidak pernah sebagai sarana dan juga tujuan (Gene Editing, 2019).

Merujuk pada “Era Kecerdasan Buatan dan Dampak terhadap Martabat Manusia dalam Kajian Etis” (Michael Reskiantio Pabubung), mengutip Filsuf Emanuel Kant “hanya manusialah yang mempunyai dignity atau martabat dalam kaitan dengan kapasitas moralnya. Dasarnya adalah otonomi. Dari semua yang ada, hanya manusia yang memiliki otonomi. Hanya manusia yang bisa bebas memilih di antara ragam kemungkinan yang ada. Menurut The Center for Bioethics and Human Dignity, martabat manusia memiliki unsur intrinsik atas kemanusiaannya selayaknya dihargai sebagai kodrat manusia. Rinie Steinmann memberi tiga unsur dasar bagi martabat manusia: (1) ontological claim yang mengacu pada kualitas unik manusia yang tak ternilai harganya, tak tergantikan, dan terdapat dalam diri setiap orang; (2) dignity of recognition yang mengacu pada pengakuan dan penghargaan terhadap sesama manusia (khususnya dalam hubungan dengan negara); (3) relational claim yang mengacu pada pemikiran Kant bahwa kehadiran negara untuk kemanusiaan bahkan menjadikan manusia sebagai fondasi dan tujuan akhir dalam kebijakan (Michael Reskiantio Pabubung, 2022).

Dalam kaitan dengan martabat manusia, peneliti berusaha mengeksplorasi hubungan antar manusia yang berdiam di suatu wilayah tertentu dengan alamnya. Manusia dan alam yang dalam penelitian ini disebut masyarakat lokal artinya masyarakat yang memaknai tanah sebagai sumber kekayaan. Ketika tanah tersebut dibasmi semenea-mena oleh pihak tertentu ‘perusahaan sawit’ dengan sendirinya sifat ini merusak tatanan hidup masyarakat lokal.

Sikap manipulatif perebutan tanah adat dijadikan lahan sawit amat rentan bagi masyarakat lokal yang lemah bersuara. Apabila kita tidak mempedulikan satu sama lain dengan sendirinya kita terjerumus dalam jurang tidak mampu memulihkan dunia. Sangatlah terpuji upaya banyak orang yang telah memberikan bukti cintakasih dan pengorbanan kepada sesama, yang lemah dan takbersuara apapun resikonya. Mereka itu adalah para pahlawan “martir” bagi sesama! Salah satu pandangan yang rancu akan pribadi manusia, antara lain menyangkal martabat dan nilai relasional pribadi. Pada saat kita memandang sesama sebagai objek, untuk dimanfaatkan dan dibuang. Cara pandang semacam ini nyatanya membutuhkan manusia serta mendorong pada budaya membuang yang individualistik dan agresif bahkan mengubahnya menjadi sekadar barang konsumsi (EG 53; LS, 22).

Sebaliknya dalam terang iman, kita mengetahui bahwa Allah memandang pria dan wanita dengan cara yang berbeda. Dia menciptakan kita bukan sebagai objek namun sebagai umat manusia yang dicintai dan sanggup mencintai; Dia menciptakan kita dalam gambar-Nya dan keserupaan dengan-Nya (Kej1:27). Dengan cara demikian Dia menganugerahi kita martabat yang khas, mengundang kita untuk hidup dalam kebersamaan dengan-Nya, kebersamaan dengan saudara-saudari kita, serta membangun suatu penghargaan pada semua ciptaan. Setiap ciptaan memiliki nilai tersendiri dan masing-masing memantulkan pancaran kebijaksanaan dan kebaikan Allah yang tanpa batas” (KGK 339). Dengan minimnya pembatasan akan nilai-nilai yang termuat dalam ciptaan lainnya maka kita mudah jatuh dalam jebakan antroposentrisme yang tidak seimbang di mana “aku” menjadi pusat dari segalanya, memandang diri terlalu penting bahkan penguasa bagi segala ciptaan. Penafsiran yang kurang tepat akan teks Kitab Suci tentang penciptaan telah menyebarluaskan kesalahpahaman tersebut, yang berimbas pada penghisapan bumi sampai pada titik menguras habis. Dengan sendirinya pentinglah bagi kita untuk memelihara bumi sebagai anugerah bukan dimanfaatkan demi memenuhi kebutuhan sesaat. Segala sesuatu yang diciptakan mampu melahirkan wajah Allah atau Allah tampak dalam seluruh ciptaan-Nya. Santo Ignasius Loyola dalam Latihan Rohani mengatakan menyadari bagaimana Allah memandang ciptaan-Nya dan bersukacita bersama mereka; menemukan kehadiran Allah dalam ciptaan-Nya dan, dengan kebebasan dan rahmat, mencintai dan merawatnya.

Kebersamaan dan keselarasan tersebut yang seringkali didambahkan oleh manusia teristimewa masyarakat lokal. Allah dalam relasi-Nya dengan manusia Ia mengharapkan manusia menghidupi apa yang disebut keselarasan dan kebersamaan dalam menjaga dan merawat kehidupan (Kej 1:28-29), serta memelihara dan merawat tanah (Kej 2:15; LS 67). Sangatjelas bahwa seseorang tidak akan menumbuhkan dan menjaga kehidupan tanpa keselarasan, kecenderungan yang terjadi pada manusia yaitu merusak. Manusia dibekali dengan logika kekuasaan ingin menguasai sesama, sifat tersebut dengan sendirinya mengusut tuntas keselarsan dalam pelayanan.

Sebagai manusia yang bermartabat mestinya membuka hati kepada mereka yang kecil dan menderita terutama masyarakat lokal. Sebagai umat beriman yang percaya akan Yesus

Kristus tidak mungkin tidak peduli atau bersikap individualistik. Ada dua sikap tidak sehat yang berlawanan dengan keselarasan antara lain: tidak peduli (saya mencari jalan lain); individualistik (mencari hanya apa yang sesuai dengan kepentingan diri). Keselarasan yang diciptakan Allah mengingatkan kita untuk memandang sesama, kebutuhan sesama, persoalan sesama, dalam kebersamaan. Kita ingin mengenali martabat pribadi manusia dalam setiap pribadi, apapun ras, bahasa atau kondisi yang menyertainya. Keselarasan menuntun kita pada pengakuan akan martabat manusia, sebagai pribadi yang diciptakan Allah tentunya manusia menjadi pusat segala ciptaan lainnya.

Konsili Vatikan II menekankan bahwa martabat manusia tidak dapat dicabut oleh siapapun sebab “Diciptakan menurut gambar Allah” (GS 12). Martabat tersebut terletak pada dasar semua kehidupan sosial dan menentukan prinsip-prinsip pelaksanaannya. Di dalam budaya modern, acuan terdekat akan prinsip martabat yang tak tergantikan yaitu deklarasi universal akan hak asasi manusia, yang dilukiskan oleh Santo Yohanes Paulus II sebagai “tonggak sejarah dari perjalanan panjang dan sulit bagi umat manusia” dan sebagai “sebuah pernyataan tertinggi dari kesadaran manusia”. Hak-hak tersebut mencakup semua lapisan manusia (individual, sosial, bangsa). Setiap manusia telah dibekali dengan apa yang disebut martabat pribadi. Martabat pribadi mampu mengerakan manusia untuk berelasi dengan bebas dengan sesama, maka ketika kita berpusat pada diri sendiri kita akan kehilangan keselarasan terhadap sesama hal ini akan menjadikan kita pribadi yang bodoh, egois dan semacamnya.

Kesadaran baru akan martabat manusia memiliki dampak sosial, ekonomi dan politik yang serius. Memandang saudara-saudari kita dan keseluruhan ciptaan sebagai anugerah yang diterima dari kasih Bapa menginspirasi sikap, kepedulian dan kekaguman yang penuh perhatian. Dengan cara demikian kaum beriman, dengan mengkontemplasikan sesamanya sebagai saudara-saudari, dan bukan sebagai orang asing, memperhatikannya dengan penuh kasih, bukan dengan penghinaan atau permusuhan.

Memulihkan Kehidupan

Masyarakat lokal dalam kesehariaanya amat bergaul dengan alam. Masyarakat lokal menggagap hutan dan tanah sebagai ibu yang menghidupkan. Masyarakat lokal yang hidup di sekitar hutan, sehari-harinya, makan dari hasil sumber yang disediakan alam. Makanan pokok didapat dari berkebun, menotok sagu di hutan sagu, mencari ikan di sungai, berburu binatang di hutan dan semacamnya disekitar tempat pemukiman. Singkatnya alam menyediakan apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Metode pembukaan hutan yang sering dilakukan perusahaan perkebunan sawit yaitu dengan menebang dan membakar.

Membakar hutan dipahami sebagai metode ampuh dan murah namun berdampak pada polusi udara. Asap yang diakibatkan pembakaran hutan juga menyebabkan berbagai penyakit seperti sesak nafas, radang tenggorokan, asma, bronkitis, penyakit paru-paru dan sebagainya. Hasil pembakaran hutan juga akan melepaskan CO₂ ke atmosfer menyebabkan efek rumah kaca, perubahan iklim climate change, kondisi ini akan membuat bumi semakin panas dan air permukaan laut semakin naik.

Demikian juga ada ajakan untuk mengurangi polusi, menghilangkan karbon dari sektor energi dan ekonomi, dan berinvestasi dalam energi yang bersih dan terbarukan, yang harus bisa diakses oleh semua. Lautan dan samudera juga menjadi pusat ekologi integral, sebab merupakan paru-paru biru planet, dan membutuhkan tata kelola yang berfokus pada kebaikan

bersama dari semua pihak pertama-tama dari tingkatan yang paling atas.

Dokumen Konsili Vatikan meneliti masalah perubahan iklim, dengan mengatakan bahwa masalah tersebut amat erat pada lingkungan, etika, ekonomi, politik, dan sosial yang berdampak pada masyarakat lokal. Oleh karena itu, pertama-tama kita memerlukan model pembangunan baru yang mengaitkan perjuangan melawan perubahan iklim dan perjuangan melawan kemiskinan, yang selaras dengan Ajaran Sosial Gereja. Mengingat bahwa tidak seorang pun yang bertindak sendirian, dokumen tersebut menyerukan komitmen untuk pembangunan berkelanjutan yang rendah karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Saran-saran yang diajukan dalam bidang ini mencakup reboisasi wilayah-wilayah seperti hutan hujan konservasi, untuk memastikan bahwa mereka mendapat perlindungan hukum dan kemanusiaan yang mereka butuhkan (Isabella Piro, 2020).

Merujuk pada penelitian Nainggolan (2013), dengan judul “Kapitalisme Internasional dan Fenomena Penjarahan Lahan di Indonesia” menemukan bahwa laju konvensi lahan terjadi karena adanya perkebunan kelapa sawit, Pembangunan infrastruktur, dan eksploitasi sumber daya alam. Munculnya degradasi tanah adat, krisis pangan, melahirkan konflik sosial antar pemilik tanah adat. Selain itu keterlibatan aparat dibalik berbagai praktik perampasan tanah adat dan lemahnya penegakan hukum memicu konflik antar sesama makin berepanjangan (Muhammad Obie dkk, 2020).

Oleh karena itu mestinya kita mengarahkan pandangan pada Yesus (Ibr 12:2) pemberi harapan datangnya Kerajaan Allah (Mrk 1:5; Mat 4:17; KGK 2816). Sebuah Kerajaan pemulihan dan penyelamatan yang telah hadir di tengah-tengah kita (Luk 10:11). Sebuah Kerajaan keadilan dan kedamaian yang diwujudkan lewat karya-karya kasih, yang berbuah pada bertumbuhnya harapan dan meneguhkan iman (1 Kor. 13:13). Di dalam tradisi Kristiani, iman, harapan dan kasih lebih dari pada sekadar perasaan atau pun sikap. Ketiganya merupakan keutamaan yang ditanamkan di dalam diri kita berkat rahmat Roh Kudus (KGK 1812, 1813).

Pembaharuan relasi dengan iman, harapan dan kasih mengundang kita untuk menumbuhkan semangat yang kreatif dan terbarukan. Dengan cara demikian, kita akan sanggup memperbaharui akar-akar kelemahan fisik, spiritual dan sosial kita dan kebiasaan-kebiasaan merusak, memisahkan antar sesama, mengancam keluarga dan alam secara luas.

Pelayanan Yesus menghadirkan berbagai contoh penyembuhan: ketika Dia menyembuhkan mereka yang terkena demam (Mrk 1:29-34), sakit kusta (Mrk 1:40-45), orang lumpuh (Mrk 2:1-12); ketika Dia meleakkan mata orang buta (Mrk 8:22-26; Yoh 9:1-7), mereka yang bisu ataupun tuli (Mrk 7:31-37). Dalam kenyataannya, Dia tidak saja menyembuhkan kemalangan kemalangan fisik namun Dia menyembuhkan keseluruhan pribadi manusia. Dengan demikian, Dia memulihkan setiap pribadi kembali kepada komunitas dan membebaskan setiap orang dari pengucilan.

Dapat didalami juga kisah tentang penyembuhan seorang lumpuh di kapernaum (Mrk 2:112). Ketika Yesus mengajar di muka pintu masuk rumah, ada empat orang yang berusaha membawa sahabatnya yang sakit lumpuh kepada Yesus. Namun tidak bisa masuk karena banyaknya orang yang berkumpul di sana, mereka membuat lobang di atap dan menurunkan tilam itu di depan muka Yesus. Yesus yang sedang mengajar melihat tilam yang diturunkan di depan-Nya. Ketika Yesus melihat iman mereka, Dia berkata kepada orang lumpuh itu, ‘Anakku, dosamu telah diampuni’ (ayat 5). Dan kemudian, sebagai tanda yang terlihat, Dia

menambahkan, “Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu” (ayat 11).

Tindakan Kristus merupakan tanggapan langsung akan iman orang-orang tersebut, akan harapan yang mereka letakkan kepada-Nya, akan kasih satu sama lain yang telah mereka perlihatkan. Yesus kemudian menyembuhkan, namun Dia tidak sekadar menyembuhkan yang lumpuh. Dia menyembuhkan setiap orang. Dia mengampuni dosa, Dia memperbaharui hidup orang lumpuh dan saudara-saudaranya. Bisa dikatakan, Dia menjadikan mereka lahir kembali. Hal ini merupakan pemulihan fisik dan spiritual, semuanya secara bersama-sama, buah dari perjumpaan personal dan sosial.

Baiklah dapat dibayangkan bagaimana memupuk persahabatan yang tampak dalam iman mereka yang hadir dan menyaksikan penyembuhan yang dilakukan Yesus. Kita sendiri boleh bertanya pada diri sendiri dengan cara apa kita mampu memulihkan kehidupan bila ada dari kita yang mengalami krisis tanah adat dan sebagainya, Sebagai murid-murid Yesus yang adalah penyembuh jiwa dan badan, kita dipanggil untuk meneruskan karya penyembuhan dan penyelamatan, secara fisik, sosial dan spiritual (KGK 1421).

KESIMPULAN

Masyarakat Papua menghayati tanah adat sebagai ibu yang harus dilindungi dan dirawat, di mana tanah tersebut menjadi sumber kehidupan dan ekosistem yang mendukung mata pencaharian mereka, seperti berburu, bertani, dan memanen sagu. Namun, masuknya perkebunan kelapa sawit telah mengancam kelestarian tanah adat dan ekosistem, menyebabkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial antar masyarakat adat. Dalam menghadapi hal ini, subsidiaritas memainkan peran penting dengan mengajak pemerintah dan Gereja sebagai pihak yang lebih tinggi untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada masyarakat lokal yang lebih rentan. Martabat manusia dan tanah sebagai pemberi kehidupan perlu dijaga, karena keduanya adalah rahmat Allah yang tidak seharusnya digusur atau dilupakan. Sebagai tanggung jawab bersama, kita diingatkan untuk membantu mereka yang kurang diperhatikan, sebagaimana diajarkan oleh Yesus tentang keberpihakan terhadap orang miskin. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reboisasi dan konservasi hutan adat serta perlindungan hukum yang lebih kuat dari pemerintah dan adat untuk menjaga kelestarian lingkungan dan martabat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Akbaryan Satmoko, & Andalas, E. F. (2020). Stereotip orang pinggiran pada kumpulan cerpen *Di Kala Pagi* karya Reni Nuryanti. *Journal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Malang Jalan Raya.
- Amalia, R. (2016). *Perubahan lanskap ekologi, kerentanan dan resiliensi nafkah rumah tangga petani di sekitar hutan di Kalimantan Timur* [Tesis]. Institut Pertanian Bogor.
- Amalia, R., Suryani, D., & Kusumawati, F. (2019). Social conflict in oil palm plantations: The role of land disputes in Papua. *Journal of Social Issues and Community Development*, 18(1), 44–59. <https://doi.org/10.1016/j.jsicd.2019.03.005>
- Andrianto, A., Komarudin, H., & Pacheco, P. (2019). Expansion of oil palm plantation in Indonesia's frontier: Problems of externalities and the future of local and indigenous communities. *Land*.
- Fransina, F. K., Sadsoeioebeon, B. M. G., Peday, H. F. Z., Tokede, M. J., Komarudin, H., Rubeta, A., & Obidzinski, K. (2014). *Oil palm estate development and its impact on*

- forests and local communities in West Papua*. Center for International Forestry Research.
- Hittinger, R. (2018). *The first grace: Rediscovering the natural law in a post-Christian world*. ISI Books.
- Joseph, D., & Bligh, G. (2017). Subsidiarity: More than a principle of decentralization – A view from local government. *Institute for Public Policy and Governance, University of Technology Sydney*.
- Long, S. A. (2017). *Solidarity and the common good: A Catholic perspective*. Oxford University Press.
- Matthias, A. (2020). Dignity and dissent in humans and nonhumans. *Science and Engineering Ethics*.
- Michael Reskiantio Pabubung. (2023). Era kecerdasan buatan dan dampak terhadap martabat manusia dalam kajian etis. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(1).
- Muhammad Obie, Pakaya, M., Mustakimah, & Syilfi. (2020). Oil palm expansion and livelihood vulnerability on rural communities (A case in Pohuwato Regency – Indonesia). *Journal Department of Philosophy, State Islamic University of Sultan Amai Gorontalo, Indonesia*.
- Pattiasina, S. M. O. (2021). Pemberdayaan Kaum Miskin Sebagai Panggilan Gereja terhadap Masalah Kemiskinan. *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 4(1), 125–140. <https://doi.org/10.34307/b.v4i1.238>
- Pope Benedict XVI. (2009). *Caritas in veritate*. Vatican.
- Pope Francis. (2015). *Laudato Si'*. Vatican.
- Pope John Paul II. (1991). *Centesimus Annus*. Vatican.
- Popovic, P. (2019). *The common good: A new approach to the social question*. Springer.
- Piro, I. (2020). *Ringkasan dokumen tentang ekologi integral* (M. Harun, Penerj.). Dokpen KWI.
- Yulian, B. E., Dharmawan, A. H., Soetarto, E., & Pacheco, P. (2017). Dilema nafkah rumah tangga pedesaan sekitar perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. *Sodality: Journal Sosiologi Pedesaan*.
- Yulian, M., Hidayat, R., & Aziz, T. (2017). The impacts of oil palm plantation expansion on local communities: A case study in Papua. *Journal of Rural Development*, 31(2), 56–67. <https://doi.org/10.1016/j.jrd.2017.03.008>



is work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**